
BEBERAPA CATATAN TENTANG SEJARAH NEGARA INDONESIA TIMUR

Bambang Sulistyono

Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Sejarah Sulawesi Selatan antara tahun 1945-1950 telah banyak diulas oleh para sejarawan. Namun membaca sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa tidak dengan sendirinya memperkuat integrasi bangsa. Dengan melihat penulisan sejarah tentang Negara Indonesia Timur karya-karya Anak Agung Gde Agung dan karya R.Z. Leirissa menunjukkan adanya beragam penafsiran. Mencerdas-kan masyarakat dengan menulis sejarahnya boleh jadi akan memicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu pembelajaran sejarah belum cukup tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran. Makalah ini berupaya membahas karya-karya sejarah Sulawesi Selatan utamanya deskripsi dan pendekatannya, serta pembelajaran sejarah Indonesia, khususnya pada siswa Sekolah Menengah Atas, agar dapat memperkuat proses integrasi bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : sejarah, historiografi, Indonesia, Negara Indonesia timur

Abstract

History of South Sulawesi between 1945 and 1950 has been studied by historians. Nonetheless, reading the histories of the Indonesian national struggle for independence does not necessarily mean strengthening national integration. Through reading historical writings on the State of East Indonesia by Anak Agung Gde Agung and by R.Z. Leirissa it can be seen the diverse interpretation of the events. Efforts to enlighten the society through the writing of history can lead to national dis-integration. Therefore studying history is not sufficient if it is not considering the study process. This paper is an effort to discuss works on South Sulawesi history especially their descriptions and their approaches, and the studying of Indonesian history mainly by high school students as an effort to strengthen national integration within the framework of the unified state of the Republic of Indonesia.

Keywords: history, historiography, Indonesia, State of East Indonesia

PENGANTAR

Mengajar sejarah semestinya tidak hanya mengisahkan peristiwa di masa lampau. Sejarah perlu dikemukakan sebagai suatu ilmu, agar mampu menarik perhatian pengkajinya; perlu dipertimbangkan filosofi, epistemology, etika dan estetikanya. Filosofi meliputi pertimbangan hakikat pengertian sejarah, epistemology tentang metodologi, etika tentang kepatutan dan estetika tentang keindahan penyajian serta manfaatnya. Pertimbangan-pertimbangan itu akan mengemansipasikan sejarah sebagai ilmu setara dengan ilmu-ilmu lainnya. Suatu peristiwa dengan kemukakan dengan mempertimbangkan makna dibalik peristiwa itu yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengapa, bagaimana dan apa manfaatnya. Dalam hal ini guru yang bertindak sebagai sejarawan sepenuhnya berperan memberi arah yang akan dituju pembaca atau anak didiknya. Arah berupa sikap, jiwa bahkan karakter tertentu.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia berkembang sangat kompleks. Perkembangan revolusi yang terjadi di tiap-tiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Antara daerah yang satu dan lainnya seringkali tidak memiliki hubungan koordinasi. Sebagai contoh di Sulawesi Tengah, Proklamasi kemerdekaan telah dikundangkan pada tahun 1942, beberapa hari sesudah Belanda menyerah kepada Jepang. Namun proklamasi ini tidak mendapat dukungan daerah-daerah lain. Proklamasi yang diterima secara Nasional adalah yang dilakukan Sukarno dan Hatta di Jawa (Jakarta). Selanjutnya perjuangan kemerdekaan di Jawa dilakukan dengan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Kedua model ini saling melengkapi, dan relative terkait dalam satu koordinasi. Republik Indonesia yang berdaulat di Jawa dapat memadukan perjuangan militer dan diplomasi. Akan tetapi di luar Jawa yang berada dibawah kekuasaan

militer Belanda, perjuangan politik tidak didukung perjuangan bersenjata. Di luar Jawa termasuk di Sulawesi Selatan Pemerintah Kolonial Belanda membuka front perjuangan diplomasi yang seluas-luasnya, untuk menjaring dukungan masyarakat dan keberlangsungan Negara Hindia Belanda. Pemerintah Belanda menawarkan pembentukan Negara-negara Federal sebagai upaya memperoleh dukungan itu. Pihak pendukung Negara kesatuan yang terdesak karena tekanan militer akhirnya memilih perjuangan dengan menggunakan Negara Federal sebagai medan perjuangannya.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui dua jalan yakni diplomasi dan militer. Perjuangan diplomasi dilakukan oleh golongan tua baik melalui parlemen dan perundingan; sementara itu golongan pemuda berjuang menggunakan senjata baik dalam bentuk perang gerilya maupun perang terbuka. Jarang sekali pejuang yang memilih dua cara itu sekaligus. Meskipun demikian keduanya merupakan suatu kombinasi perjuangan yang menentukan keberhasilan perjuangan. Perjuangan militer nampaknya lebih dominan dari pada diplomasi yang memaksa Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Negara Kesatuan Indonesia. Namun diplomasi juga penting, karena dalam kenyataannya kemerdekaan Indonesia dipengaruhi juga oleh perkembangan politik internasional, terutama Inggris dan Amerika, Rusia, Cina, Mesir, India, Burma dan lain-lain. Memahami sejarah perjuangan kemerdekaan dengan demikian semestinya meliputi perjuangan diplomasi dan militer, bukan hanya salah satu di antaranya.

SULAWESI SELATAN DALAM SEJARAH INDONESIA PERIODE 1945-1950

Sesudah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Jawa

dan Sumatera Proklamasi kemerdekaan ditindaklanjuti dengan perebutan kekuasaan dari Jepang. Sekutu datang di Indonesia. (Inggris di Sumatra dan Jawa; Australia di Kalimantan dan Indonesia Timur); mendapat reaksi yang berbeda. Di Jawa dan Sumatra, tentara Inggris yang mendukung NICA (Netherlands Indische Civiel Administration) pembentukan pemerintahan Hindia Belanda direspon oleh pemerintah Republik yang mendapat dukungan pemuda bersenjata. Gerak maju tentara Inggris mendapat perlawanan pemuda bersenjata. Sementara itu di Sulawesi, tidak terjadi pengambil alihan kekuasaan Jepang, sehingga ketika tentara Australia membawa aparat NICA, tidak mendapat kesulitan membangun kembali pemerintahannya, dengan difasilitasi tentara Jepang. Ratulangi setelah kembali dari Jakarta (22 Agustus 1945), tidak menghendaki perlawanan bersenjata untuk menegakkan kemerdekaan. Ratulangi sebagai tokoh politik terkemuka di Sulawesi mengetahui tentang kehebatan tentara Sekutu dalam Perang Dunia melawan Jepang. Baginya senjata di tangan pemuda hanya akan berakibat malapetaka bagi rakyatnya. Memang di Sulawesi Selatan bagian Utara (Luwu) terjadi perlawanan terhadap kehadiran tentara Australia, namun peristiwa ini terjadi tanpa dukungan Dr. Ratulangi, sebagai gubernur Sulawesi. Reaksi pemuda Republikan dalam bentuk berbagai demo unjuk rasa baru terjadi setelah NICA berhasil membangun kekuasaannya. Demo berubah menjadi tindak kekerasan sesudah mereka mengetahui bahwa di Surabaya telah terjadi pertempuran yang memuncak pada tanggal 10 November di Surabaya. Selanjutnya perlawanan bersenjata dimulai bersamaan dengan penyelenggaraan konferensi Malino 15-25 Juli 1946, yang bertujuan mendirikan negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian di seluruh Indonesia.

Perlawanan semakin meningkat dan meluas seperti di Bantaeng, Pare-pare,

Makassar, seiring dengan semakin seriusnya Van Mook, selaku Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mendirikan Negara federal. Akibatnya pada 11 Desember 1946 Panglima tertinggi Angkatan Perang Hindia Belanda mengumumkan Negara dalam Keadaan Darurat dan Perang (Staat Oorlog en Beleg). Westerling memimpin pasukan khusus (Rode Baretten) melakukan operasi militer atas para pejuang kemerdekaan, akibatnya 40.000 orang menjadi korban. Dalam situasi seperti pada 7-24 Desember 1946 Letnan Jenderal H.J. van Mook menyelenggarakan Konferensi Denpasar yang berhasil membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai salah satu Negara bagian yang akan dibentuk kemudian di seluruh Indonesia. NIT meliputi Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, dan Maluku, tanpa Papua. Keberhasilan konferensi Denpasar selanjutnya diikuti dengan pembentukan Negara-negara federal lainnya sehingga terbentuk Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan lain-lain.

MEMILAH MATERI SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS ?

Namun sejarah negara-negara Federal itu tidak dijadikan materi pelajaran di sekolah-sekolah baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Boleh jadi pemerintah selama ini berpendapat bahwa sejarah Negara-negara federal tidak patut diajarkan. Dalam pandangan pers Republik, Negara-negara federal merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dalam dalam mengepung dan menghancurkan Negara Kesatuan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Lebih dari itu boleh jadi pemerintah sejak masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Rezim Orde Baru beranggapan Negara-negara federal merupakan aib karena Indonesia “terpecah-belah” dalam Negara-negara bagian yang dalam proses pem-

bentukannya bertumpu pada perbedaan kebudayaan, agama, geografi dan lain-lain, yang pada masa Orde Baru digolongkan sebagai bagian dari SARA, singkatan dari suku, agama dan ras serta antar golongan. Mengajarkan Negara-negara Federal dianggap sebagai upaya menghidupkan SARA, yang diyakini akan membahayakan kesatuan nasional. Namun NIT dan Negara – negara Federal lainnya diawal perjuangan kemerdekaan adalah suatu kenyataan sejarah. Di dalam Negara-negara Federal itu juga terdapat perjuangan untuk membela Negara Kesatuan.

Dalam negara kesatuan perbedaan suku, bangsa atau ras diabaikan (Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI menyatakan kesatuan adalah Negara kebangsaan (etat national) yang merdeka dan berdaulat penuh bukan federalism (persekutuan), feodalisme (susunan yang sudah lama berlaku di Indonesia), monarchie (kepala Negara dijabat berdasarkan keturunan), liberalism, autokrasi dan birokrasi, dan demokrasi baarat. Baca; Helius Sjamsuddin & Hj. Enok Maryani. Kalimantan Dalam Masa Revolusi Indonesia (Tarik-Ulur Antara Unitarisme dan Federalisme 1945-1950. Bandung: 5 Oktober 2008, p3-4. Dalam http://file.upi.edu/Direktori/F_P_I_P_S/JUR._PEND._GEOGRAFI/1960012119850). Tujuan politik tidak pada suku, bangsa dan agama, tetapi pada ideology. Oleh karena itu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili partai-partai politik, yang mewakili golongan dengan cita-cita politik tertentu. Sertikat Islam bercita-cita mewujudkan masyarakat yang Islami, Partai Nasional bercita-cita mewujudkan masyarakat yang bersatu tanpa dibeda-bedakan berdasar asal-usul keturunan mereka.

Dapat dimengerti jika kita mengkaji karya Anak Agung Gde Agung yakni Dari Negara Indonesia Timur ke Republik In-

onesia Serikat yang terbit tahun 2008 dan karya Prof. Dr. R.Z. Leirizza *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* yang di terbitkan pada tahun 2006, akan diperoleh kesimpulan bahwa kelompok politisi, yang pada mulanya merupakan lawan gerakan pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), berperan penting dalam memenangkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kekuatan ketiga adalah kelompok yang pro kepada kemerdekaan yang memilih strategi kooperatif kepada pemerintah Kolonial Belanda dengan mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah terbitnya karya Prof. Leirizza (tahun 2007) pemerintah Republik Indonesia mengakui Anak Agung Gde Agung, mantan Perdana Menteri NIT sebagai pahlawan Nasional. Padahal I Gusti Ketut Puja Gubernur Sunda Kecil (meliputi Nusatenggara dan Bali) yang menjadi lawan politiknya baru diakui sebagai pahlawan nasional pada lima tahun berikutnya, yaitu tahun 2011. Namun berbeda jika kita membaca karya J.R. Chaniago: *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin local dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatra Timur 1950*. Karya ini adalah disertasi Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Atau karya Sarita Pawiloy Arus Revolusi 1945, akan diperoleh penjelasan yang berbeda. Fakta ini membingungkan, golongan yang bermusuhan sama-sama diakui sebagai pahlawan Nasional. Artikel ini berupaya membahas karya-karya itu dengan memperbandingkannya. Ke empat karya itu merupakan produk sejarah yang ditulis oleh akademisi. Tidak terkecuali meskipun seluruhnya adalah sejarawan professional, bersifat subyektif. Sebagai karya yang subyektif bukan berarti keempatnya tidak realistic. Dalam arti menjelaskan obyek kajian sesuai dimensi penulisnya masing-masing. Semuanya membahas perjuangan revolusi kemerdekaan di Sulawesi Se-

latan, yang berlangsung sejak masa pendudukan militer Jepang, pembentukan dan perjuangan dalam NIT, dan terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia.

KOMPARASI OBYEK KAJIAN DAN METODE PENULISAN.

Karya Anak Agung membahas NIT, sejak berdirinya sampai diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Indonesia. Namun penjelasan Anak Agung lebih sebagai pengalaman petualangan berpolitik selama periode itu. Anak Agung adalah Perdana Menteri Negara Indonesia Timur sejak tahun 1947 sampai 1950, sesudah itu ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat yang dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Buku ini membahas dinamika politik Negara Indonesia Timur. NIT adalah salah satu Negara bagian dari Negara Federal Hindia yakni Gemeenebest (suatu Negara Persemakmuran) di bawah Ratu Belanda. Di sepanjang keberadaannya ditandai dengan dinamika politik berupa jatuh bangunnya kekuasaan kabinet-kabinetnya sebagai dampak perjuangan politik antara yang pihak yang pro Hindia Belanda dengan pihak yang memihak negara Kesatuan Indonesia.

Fokus pembahasan Anak Agung pada perdebatan dalam gedung parlemen yang terpengaruh oleh perkembangan politik dan militer di tingkat nasional (di Jawa dan Sumatra). Namun pihak-pihak yang bertentangan akhirnya memiliki kesamaan tujuan yakni mencapai Indonesia merdeka yang bebas dari Belanda. Sesudah membahas pendahuluan, Anak Agung membahas Bab I yakni Konferensi Malino 16 Juli 1946-25 Juli 1946. Bab II Konferensi Denpasar 7 Desember 1946 - 2 Juni 1947, Bab III Kabinet Najamuddin Daeng Malewa, Bab IV Kabinet Nadjamuddin Daeng Malewa II, 2 Juni 1947-11 Oktober 1947; Bab V, Kabinet Warrow, 11 Oktober 1947 – 15, Bab VI Kabinet Anak Agung Gde Agung Pertama 15

Desember 1947- 12 Januari 1948, Bab VII Kabinet Anak Agung Gde Agung ke dua 12 Januari 1948 - 27 Desember 1949, Bab VIII, Kabinet J.E. Tatengkeng, 27 Desember 1949 - 14 Maret 1950, dan Bab IX Kabinet Ir. D.P. Diapari, 14 Maret 1950 - 10 Mei 1959, akhirnya Bab X Kabinet Ir. J. Poetoeheha, 10 Mei 1950 - 16 Agustus 1950. Sebagai Perdana Menteri, ia memiliki dokumen yang cukup banyak sehingga ia mampu menulis sampai 860 halaman. Dalam uraiannya terkesan bahwa ia hendak membenarkan kebijakan politik yang diambilnya. Ia berhasil mengendalikan politik, sesuai aspirasi politik yang berkembang di NIT. Puncak perannya adalah ketika situasi yang gawat akibat aksi militer Belanda kedua 18 Desember 1948 berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik dan menangkap Presiden, Wakil dan beberapa menterinya, ia tampil sebagai “juru selamat”, dengan memanfaatkan situasi pada masa itu. Ia berhasil mengarahkan seluruh negara-negara federal yang didirikan Belanda untuk bersatu dan menyelenggarakan perundingan dengan pihak Belanda dengan melibatkan Republik Indonesia sehingga Belanda menyerahkannya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Ia benar-benar focus, pada kajiannya sehingga seolah-olah dinamika sejarah Sulawesi Selatan baru ada sesudah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II (1945). Sesudah itu ia menjelaskan perkembangan dinamika politik daalam NIT, yang kenyataannya meliputi interaksi antar fraksi, dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Kabinetnya. Ia sedikit sekali mengisahkan peran pemuda pejuang kemerdekaan, sehingga terkesan mengabaikan peran pemuda. Sebagai hasil pengalaman maka karya Anak Agung diterima dengan skeptif oleh lawan-lawan politiknya. Penulisan karyanya dituduh semata-mata hanya sebagai sarana membela kebijakan politiknya yang pada mu-

lanya memusuhi Republik. Putra I Gde Ketut Puja menuduh bahwa Anak Agung yang merekomendasikan penangkapan I Gde Ketut Puja, Gubernur Republik Indonesia di Nusatenggara Timur, menjelang pembentukan NIT (Protes ini disampaikan dalam seminar memperingati Sumpah Pemuda di Jakarta, di Museum Nasional Jakarta, 30 November 2014).

Beberapa kasus dapat dikemukakan misalnya pada halaman 39, Anak Agung menyatakan bahwa Kebijakan di Timur Besar dan Borneo berbeda dengan di Jawa. Di Timur Besar tentara Australia mencampuri urusan pemerintahan, sehingga di daerah yang telah diduduki, segera dibangun pemerintahan NICA. Sementara itu di Jawa pihak militer Inggris tidak mencampuri urusan pemerintahan, sehingga Inggris harus bekerja sama dengan pemerintah Republik untuk melucuti Tentara Jepang dan mengembalikannya ke tanah air mereka. Nampaknya ia mau menegaskan bahwa perjuangan diplomasi yang peling tepat Perbedaan menjadikan Sulawesi Selatan

Pada halaman 72 Anak Agung menulis bahwa atas prakarsa Lion Chacet, Conica (Comandan Netherland Indische Civil Administration) pada tanggal 30 Desember 1945 menyelenggarakan rapat besar yang dihadiri 41 orang. Hadir Arumpono, Andi Mappanyuki, Raja Goa, Andi Jemma (Datu Luwu), Aru Maloesetasi, Datu Suppa, Aru Soppeng Diradja, Maradina Ballanipa, Aru Billa Soppeng juga anggota Dewan Hadat seperti Andi Pangerang Pettarani, Tomarilalang Goa dan Bone, Ujungtanah, Karaeng Bonthain, Galesong, Pangkajene, Binamu, Aru Bulu-bulu Timur dan Barat serta wakil-wakil Pusat Keselamatan Rakyat (Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Inchi Muhammad Saleh Daeng Tompo, Lanto Daeng Pasewang, dan W.S.T Pondag) (Agung, 1985: 72). Dalam rapat Lion Chacet mengemukakan rencana hendak mendirikan dewan penasehat untuk pe-

merintahan militer. Rapat menanggapi ajakan itu sehingga berhasil dibentuk Panitia persiapan yang terdiri dari: Tomarilalang Bone, Aru Matjege Bone, Andi Pangerang, Datu Suppa, Karaeng Pangkajene, W.S.T. Pondaag (Pusat Keselamatan Rakyat) dan lain-lain (Agung, 1985: 74). Dengan peristiwa ini seolah-olah perkembangan politik di Sulawesi Selatan telah menerima kehadiran Belanda; dengan menyatakan bersepakat membentuk dewan penasehat untuk pemerintah militer, seolah-oleh para pemimpin Republik seperti Andi Mappanyuki, Andi Jemma, Datu suppa, Maradia Ballanipa dan Andi Pangerang Pettarani menyetujui kebijakan politik Belanda, termasuk seluruh operasi militer Belanda yang mengorbankan ribuan pemuda dan rakyat Sulawesi Selatan (Ide Anak Agung tidak memberi penjelasan bagaimana nasehat mereka kepada pihak militer).

Nampaknya perlu dipertanyakan kebenaran dari “sikap kooperatif Andi Jemma, Andi Pangerang, dan Datu Suppa (Abdulah Bau Masepe)”. Informasi tentang Andi Jemma tidak sinkron dengan deskripsi Barbara Sillar Harvey. *Dari Tradisi ke DI/TII*, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Andi Jemma mengeluarkan ultimatum kepada seluruh anggota KNIL agar kembali ke barak. Namun ultimatum tidak dihiraukan sehingga meletus pertempuran. Tentara Australia dan KNIL terdesak. Keesokan harinya datang sebuah kapal perang berbendera merah putih; ternyata kapal ini mengangkut tentara Australia dari Makassar. Sesudah dekat pelabuhan mereka menembaki para pemuda pejuang dan menurunkan sejumlah pasukan. Pertempuran pun berkobar kembali. Pihak pemuda terdesak dan meninggalkan kota. Andi Jemma dan keluarganya mengikuti para pemuda berjuang di hutan-hutan dan gunung-gunung di Sulawesi Tenggara dengan basis utamanya benteng Batupute. Andi Jemma dan para pengikutnya baru dapat ditawan

pada tanggal 2 Juni 1946. Jenderal Nasution mencatat perlawanan di Luwu merupakan pertempuran terbesar di Luar Jawa, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah apa mungkin Andi Jemma yang terlibat mendampingi pemuda dalam perang gerilya menghadiri undangan rapat Conica di Makassar ?.

Pertemuan 30 Desember 1945 juga tidak selaras dengan hasil penelitian Salim Said dalam Seminar Andi Mattalata Sebagai Pahlawan Nasional di Universitas Hasanuddin, pada tanggal 1 September 2015 tentang Abdullah Bau Masepe, yang sesudah persetujuan Linggajati ditandatangani oleh Prof. Schemerhorn dan Sutan Syahrir pada tanggal 15 November 1946 menyelenggarakan rapat pemuda di Pare-pare. Dalam rapat itu Datu Suppa, yang sangat kecewa kepada Sutan Syahrir, memerintahkan Andi Matalata dan Saleh Lahade ke Jawa untuk mempertanyakan mengapa perundingan Linggajati hanya mengakui wilayah Republik Indonesia terdiri dari Jawa, Madura dan Sumatra. Abdullah Bau Masepe sendiri gugur dalam perjuangan bersenjata kemerdekaan di tahun 1947 (Andi Mattalata yang menemui Sukarno kecewa ketika mempertanyakan hasil Linggajati. Sukarno justru mempertanyakan apakah para raja-raja di Sulawesi Selatan sudah siap untuk merdeka. Namun ia terhibur ketika menemui Panglima Besar Jenderal Sudirna supaya Mattalata mengabaikan ucapan Sukarno. Sudirman menyatakan abaikan saja ucapan Presiden, yang penting kita harus berbuat sesuatu untuk Republik). Pertanyaan juga dapat ditujukan kepada Andi Mappanyuki dalam Willem Izeref bahwa Andi Mappanyuki menolak undangan Tentara Australia via telegram. Ia dengan tegas menolak bertemu dengan Conica. Ia hanya mau mengakui Republik dan bekerjasama dengan Dr. Ratulangi.

Karya Leirissa memiliki kesamaan

dengan karya Anak Agung, keduanya ditulis dengan menggunakan arsip, yang umumnya berbahasa Belanda. Leirissa menggunakan koleksi NEFIS (Netherlandsch Forces Intelligence Service). Ia berasal dari suku dan kelahiran Ambon. Ketika menulis karya itu berkedudukan sebagai Profesor pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia Jakarta. Dapat dimaklumi bahwa ia memiliki kemampuan membaca arsip-arsip berbahasa Belanda. Leirissa banyak membaca laporan-laporan, pendapat dan pemikiran serta hasil dialog dan interaksi para penentu dan pengambil keputusan, terutama di kalangan elit politik di NIT, Pemerintah Kolonial Belanda dan Negeri Belanda. Sumber Arsip yang dipergunakan terutama selain di Jakarta, juga di Negeri Belanda.

Gagasan Leirissa tersirat pada komposisi bab karyanya yang dimulai dengan: Lahirnya asas Federalisme, Dua versi Federalisme, Timbulnya kekuatan Ketiga, Menolak perang Belanda –Indonesia, Bangka, Terobosan-terobosan Anak Agung, Konferensi Internasional dan akhirnya: Syntesa Nasional (Leirissa, 2006: iii). Leirissa benar-benar focus pada perkembangan diplomasi. Ia fokus pada para politisi Australia, Amerika, Inggris, Belanda, Belgia dan Jakarta yang terlibat adu argumentasi. Namun ia juga mengabaikan perjuangan bersenjata, terlebih lagi peranan para pemuda. Apabila Anak Agung masih menyinggung perjuangan bersenjata para pemuda, Leirissa justru tidak menyebutkan sama sekali perlawanan pemuda, kekejaman Westerling dan peranan Pemerintah Republik Indonesia di bawah Gubernur Ratulangi. Bahkan gagasan van Mook untuk menciptakan gagasan Federalisme, bukan karena adanya perlawanan bersenjata, tetapi karena hikmahnya belajar pengalaman Perancis dalam mempertahankan dominasi di bekas negeri jajajahannya di Indo-Cina. Masalah yang timbul akibat Prokla-

masi Kemerdekaan Vietnam (Leirissa, 2006: 19. Dalam hal ini bukan berarti Leirissa tidak tahu adanya berbagai perlawanan pemuda atas kehadiran kembali Belanda, karena sesungguhnya ia memiliki banyak sekali sumber berupa laporan-laporan NEFIS, Namun ia ingin menambahkan sesuatu yang baru, yang tidak mendapat perhatian sejarawan lainnya). Dari delapan bab karyanya, hampir empat bab di dominasi oleh peran Anak Agung yang semakin memuncak dengan berbagai upaya yang akhirnya menghasilkan kebijakan sintesa Nasional antara Republik Indonesia dan Negara-negara Gemeenebest (persemakmuran) berupa terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang dibawah Presiden Sukarno dan Menteri Dalam Negerinya Anak Agung Gde Agung. Sementara itu Angkatan Perangnya merupakan gabungan antara KNIL dan TNI.

Salah satu temuan penting dari karyanya adalah tentang kekuatan ketiga, yakni para elit politik dalam Negara-negara Federal (BFO), berperan dominan menggiring pencapaian kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu Republik dalam keadaan krisis akibat agresi militer ke dua yang berhasil menangkap Presiden Sukarno dan para anggota kabinetnya. Berawal dari kebijakan Anak Agung Gde Agung berhasil diselenggarakan Konferensi Intern Indonesia yang menuntut pembebasan Sukarno dan kawan-kawannya tanpa syarat dan penyelesaian politik lewat perundingan. Puncaknya adalah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat melalui Konferensi Meja Bundar. Peran dominan kekuatan ketiga itu menjadi alasan utama Anak Agung Gde Agung diangkat sebagai pahlawan Nasional.

Namun deskripsi tentang keberhasilan diplomasi kekuatan ketiga, mengisyaratkan seolah-olah kemerdekaan Indonesia hanya dicapai lewat perjuangan diplomasi. Sebaliknya perjuangan bersenjata

para pemuda di lapangan tidak tampak. Hal ini berbeda dengan karya Andi Mattalata: *Meniti Siri dan Harga Diri*, Catatan dan Kenangan dan karya-karya Jenderal Nasution yang menggambarkan perlawanan-perlawanan bersenjata justru meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, sehingga memberi kesan Belanda telah gagal menghancurkan TNI sebaliknya telah meningkatkan dan memperluas medan pertempuran.

Sangat kontras dengan Anak Agung dan Leirissa, adalah karya Sarita Pawiloy. Sarita menulis *Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan*, dengan berdasarkan sumber lisan yang diperoleh dari para pejuang bersenjata, baik gerilyawan maupun militer pendukung Negara Kesatuan Indonesia.. Karya Sarita, meskipun ia staf pengajar Jurusan Sejarah IKIP Makassar (sekarang Universitas Negeri Makassar), kurang memuaskan pembacanya, karena tidak menunjukkan sumber yang digunakan atau catatan kaki (yang berisi sumber informasi yang dikutipnya). Dari sudut pandang pemuda pejuang, NIT semata-mata hanyalah Negara Boneka Belanda. Seluruh politisi yang bergabung dalam NIT, jika bukan pengkhianat adalah orang-orang yang kalah dan dipaksa untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Pengamatan dari lapangan menyebabkan uraian tidak focus pada satu tempat. Seringkali penjelasan meluas pada rentang waktu yang panjang di abad 17, yang diyakininya merupakan factor yang mendorong perjuangan kemerdekaan pada tiga setengah abad kemudian. Para pejuang tersebar di berbagai daerah, sehingga Sarita membahas peristiwa di berbagai daerah yang seringkali terkait dengan berbagai kerajaan. Seringkali peristiwa yang satu dengan lainnya tidak terkait secara langsung. Misalnya perlawanan kehadiran kembali Belanda di Luwu tidak terkait dengan perkembangan yang terjadi di Polongbangkeng, juga tidak terkait dengan peristiwa dalam waktu yang sama di

Kolaka. Terlebih lagi pertempuran-pertempuran sesudah operasi militer Westerling pada akhir tahun 1946 sampai awal tahun 1947. Secara menyeluruh uraian menjadi kurang runtut karena tidak focus pada satu tempat. Karya Pawiloy merupakan akumulasi unit-unit peristiwa yang seringkali bersifat otonom. Bahkan Sarita mengisahkan perlawanan itu merupakan kelanjutan dari Perang Makassar 1666-1669, kemudian terus berlanjut pada masa kedatangan Inggris 1811-1816, sesudah itu dikembalikan ke Belanda, sesudah itu perkembangan masa pergerakan Nasional dan puncaknya adalah revolusi kemerdekaan.

Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa Anak Agung menulis dari dalam gedung Parlemen, Leirissa dari kalangan elit Belanda, Sementara itu Sarita Pawiloy dari lapangan, di medan pertempuran dari kalangan pejuang yang seringkali tidak memahami perkembangan politik yang terjadi di tingkat elit. Sementara itu Chaniago menjelaskan dengan memasuki gedung Parlemen dan kemudian berupaya menjelaskan reaksi yang terjadi di luar gedung atau sebaliknya. Ia Nampak berpendapat bahwa antara perjuangan di dalam dan di luar gedung, masing-masing saling berkaitan. Sesuai judulnya fokus pembahasan Chaniago adalah tahun 1950, yang berpuncak dengan pembubaran NIT dan pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Pertanyaan utama yang dibahas adalah mengapa NIT dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Indonesia. Dalam hal ini ia tidak mencari jawabannya di Jakarta atau Negeri Belanda, tetapi di Sulawesi Selatan. Sekilas ia menjelaskan bahwa Rakyat Sulawesi Selatan menghendaki Negara kesatuan, dan bukan Negara federalis. Golongan pro Republikan maupun yang anti Republik yang akhirnya mengantarkan integrasi NIT dalam Negara Republik Indonesia dengan mendiskripsikan latar belakang dan prosesnya. Dengan kata lain

menafsir kepahlawanan mereka. Namun sesuai dengan judulnya Chaniago membandingkan perkembangan yang terjadi di Sulawesi Selatan dengan di Sumatra Timur. Ada yang berbeda di kedua daerah itu. Di Sulawesi Selatan ada kepeloporan bangsawan dalam gerakan kemerdekaan seperti Keluarga Andi Mapanyuki, keluarga Andi Jemma, keluarga Pajonga Daeng Ngalle dan lain-lain. Sementara itu di Sumatra Timur bangsawan justru menjadi korban revolusi. Secara menyeluruh komposisi bab disertasinya terdiri dari Bab I Pengantar, Bab II Dua Wilayah Dua Sejarah, Bab III Persaingan Lokal di awal Revolusi, Bab IV Politik Pengepungan Belanda Menjelang RIS, Bab V Sulawesi Selatan di bawah NIT, Bab VI Sumatra Timur di bawah Negara Sumatra Timur, Bab VII Membentuk Negara Federal, Bab VIII Gerakan Massa di Sumatra Timur, Bab IX Gerakan Massa di Sulawesi Selatan, Bab X Bentuk dan Susunan Negara Kesatuan, Bab XI Realisasi Pembentukan Negara Kesatuan.

Sementara itu karya Massiara merupakan bentuk paradox dari karya Anak Agung Gde Agung. Sama seperti Anak Agung Gde Agung, Massiara adalah pelaku sejarah. Beberapa bagian dari tulisannya adalah pengalaman pribadinya sebagai pejuang Nasionalis dan wartawan senior sejak masa pergerakan nasional, jaman Jepang dan revolusi kemerdekaan. Massiara mewakili kelompok pemuda Republikan yang anti Belanda dan Federalisme. Kedudukan sebagai pejuang kemerdekaan sejak Jaman Jepang dan terlibat dalam revolusi merupakan keunggulan karyanya. Dari karya ini kita dapat memahami bahwa wartawan pada masa lampau adalah politisi. Dengan profesinya ia dapat merekam informasi sejak dari Tokyo, Jakarta, Makassar, bahkan Sulawesi Selatan. Namun semua karya itu sama-sama menjelaskan fakta tentang proses sejarah menuju pada Negara Kesatuan Indonesia. Mirip karya Sarita, Massiara menjelaskan

karya berawal dari To Manurung di Gowa, meskipun puncaknya dan uraian lebih banyak dan lebih detail masa Jepang dan revolusi kemerdekaan.

Seluruhnya bertujuan mewujudkan Negara kesatuan sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. J. R. Chaniago (Chaniago, 1950: 261), Kekhawatiran pada corak kemajemukan masyarakat yang dianggap dapat menjadi factor disintegrative, ternyata waktu itu malah berubah menjadi factor kekuatan pendorong persatuan bangsa (Chaniago, 1950: 3). Ia mengemukakan bahwa Fraksi Kesatuan Nasional dipimpin Lanto Daeng Pasewang beranggota 22 orang; Kesatuan Nasional Konstruktif diketuai Husein Puang Limboro wakilnya 20 orang; Fraksi kerakyatan E.U. Pupela terdiri dari 11 orang; Fraksi Indonesia terdiri dari wakil-wakil Sumbawa, Lombok, Gorontalo dan lain lain; dan Fraksi Sosialis. Pada tahun 1949-1950 seluruhnya mendukung Negara kesatuan. Ketika RIS dibentuk berkembang semangat untuk bersatu luar biasa.

Karya menarik berikutnya adalah Andi Mattalatta. *Meniti Siri dan Harga Diri, Catatan dan Kenangan*, diterbitkan di Jakarta oleh Khasanah manusia Nusantara pada tahun 2014. Buku ini ditulis sebagai suatu auto biografi yang berfokus pada perjuangan dan pengabdianya kepada Republik sejak Proklamasi sampai tahun 1957. Perjuangan itu sebagai upaya menegakkan kehormatan yang dalam bahasa bugis disebut *meniti siri* atau yang diwujudkan dengan menjunjung kehormatan bagi diri, keluarga dan bangsanya. Ia berjuang bagi bangsanya yang tergabung dalam NKRI secara konsisten.

Menurut pengakuannya ia pada mulanya adalah manusia biasa yang berperawakan sedang, lemah dan berperasaan halus, tetapi akhirnya karena ketekunan dan kegigihannya menjadikannya pemuda yang kuat dan tangkas. Ia

adalah pahlawan yang berani yang cerdas dan optimis membela Republik. Kemampuannya tidak kalah dibandingkan Jati Kusumo, Sungkono bahkan Suharto. Ia berperan dominan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Karena pasukannya sempat menguasai wilayah disekitar Malioboro, Benteng Vre Den Burg dan gedung Asisten Residen (kini Istana Negara) yang kemudian menjadi bukti bahwa TNI sesudah aksi Militer Belanda ke II masih ada. Akibat serangan Dewan Keamanan mendesak Belanda melakukan perundingan damai dengan Republik. Ia berperan penting dalam berbagai pertempuran misalnya memporakporandakan pasukan-pasukan Belanda yang hendak menyerang markas Jenderal A.H.Nasution, Kepala Staf Pertahanan RI di Banaran, memporakporandakan pasukan Belanda di Kaliurang. Ia juga terlibat dalam berbagai pertempuran melawan RMS, di Maluku, dan tidak kalah pentingnya, mengalahkan para gerombolan dan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ia adalah jagoan yang tidak terkalahkan. Semua perlawanan-perlawanan yang tangguh dapat diatasinya.

Ia memahami sejarah masa kini sebagai kelanjutan masa lampau. Ia menjelaskan perannya sebagai merupakan bagian dari proses sejarah Sulawesi Selatan. Menulis untuk mencari identitas orang Sulawesi Selatan dengan menjelaskan kerajaan-kerajaan dan raja-raja besarnya yang pernah ada. Lebih berjasa dari pada Brigade Mataram. Ketika ada serangan brigade Mataram menanggapi pakaianya menyamar sebagai penduduk biasa. Namun pasukannya yang dipimpin Kasim DM melakukan penyerangan dengan pakaian militer atas pasukan Belanda. Dan seluruhnya menyerah dan ditawan. Namun sesudah itu diambilalih Brigade Mataram, sehingga namanya melejit sebagai pahlawan yang berhasil menangkap tentara Belanda (Mattalatta, 2014: 553).

Tipe ideal Bugis, tidak sama den-

gan Saweri Gading, tidak mewarisi sikap leluhurnya yang mendapat bindang mahaputra dari Ratu Belanda. Ia figure bangsawan berkarakter sopan, disiplin, berbudi pekerti halus, pintar, tetapi tegas, berani, tangkas, sebagai pendekar, bukan emosional, ceroboh dan cengeng.

Dari karyanya kita dapat mengerti tentang hubungan yang akrab dan dekat antara Jawa dan Sulawesi Selatan. Komunikasi dengan kapal tidak menjadi halangan komunikasi. Terkesan Bugis dan Makassar lebih memiliki Indonesia dibanding suku-suku lain.

Pada tahun 1956 situasi politik Nasional memanas. Nampaknya akibat keputusan Konferensi Meja Bundar yang menyatakan Republik Indonesia membayar seluruh anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda sejak Perang Dunia II dan Indonesia harus mengembalikan seluruh asset ekonomi Belanda di Indonesia semakin dirasakan dampaknya. Tuntutan pemerataan pembangunan berkembang didaerah-daerah. Pada 15 Februari 1957 PRRI Permesta diproklamasikan di Sumatra, namun korupsi meraja lela. Kepemimpinan Kolonel Sudirman, (dari Jawa Timur), Panglima KDPSSST (Komando Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan dan Tenggara) lemah (Mattalatta, 2014: 620). Wakinya, Letkol Saleh Lahade, pada 2 Maret 1957 menyatakan dukungan pada PRRI Permesta. Gerombolan melakukan perlawanan di mana-mana.

Para koruptor di jaman NIT seperti Andi Mattonrokang, Mappakaya Daeng Sijaling, Pabicara tidak merubah kebiasaannya. Mereka menyatakan telah membangun barak-barak militer di Limbung, Pari'risi, takalar, Malino, Camba, Balocci, Amarang, Malino, Camba, dan Mandalle. Dana sudah dicairkan Panglima, tapi kenyataannya barak baru hanya ada di Maros, Pangkajene dan Segeri; bukan barak yang seharusnya mereka bangun. Andi Mattalatta ingin

bersikap netral. Ia bermaksud mengundurkan diri secara tertulis. Ia telah menulis surat keluar dari dinas Ketentaraan, tetapi tidak dapat dikirimkan karena kantor pos tutup, pegawainya mogok (niat ini dibatalkan ketika ia merasa terpanggil untuk kembali membela bangsanya diambang kehancuran).

Kolonel Sudirman menerapkan konsep Gerakan metafisika. Panglima menyatakan manusia memiliki sifat baik dan buruk. Konsep ini berkembang dari fakta ketika para pemuda pejuang Sulawesi Selatan di Jawa, mereka adalah Nasionalis, tetapi sesudah di Sulawesi Selatan berubah menjadi pemberontak. Perubahan ini terjadi karena factor lingkungan. Gerombolan Usman Ballo memiliki pengikut tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di Sulawesi Tenggara. Dengan melalui tekanan militer dan perundingan akhirnya bersikap pro Republik. Usman Ballo bersama pasukannya diperintahkan pindah ke Makassar, namun ia tetap berhubungan dengan kahar Muzakkar sehingga terlibat dalam aksi-aksi pengacauan, Akhirnya ia dipindahkan ke Surabaya bersama satu peleton pasukannya ditambah dengan 100 orang pasukan wanitanya. Panglima Sudirman memberi 32 truk untuk pasukan Usman Ballo. Dampak perpindahan ini kekuatan kahar Muzakkar praktis lumpuh. Namun di Surabaya Usman Ballo tidak merubah hobinya "memburu "gadis-gadis remaja di kampong-kampung. Akhirnya masyarakat Surabaya tidak dapat menahan kemarahannya. Mereka menyerang dan membakar tempat kediaman dan truk-truk pasukan Usman Ballo. Usman Ballo berhasil lolos dari amukan, menyelamatkan diri dan bersembunyi di Malang (Mattalatta, 2014: 618).

Mattalata adalah pribadi yang konsisten pada pendirian politiknya di sepanjang hayatnya. Di hari tuanya, sesungguhnya telah pension, pada tahun 1990an berkembang Reformasi. Masalah

pokoknya adalah pemerataan pembangunan, keadilan dan pemberantasan KKN. Namun ia menyayangkan gerakan melenceng dan ditunggangi niat dan pikiran kotor oleh kelompok dan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memunculkan tuntutan Indonesia Timur Raya Merdeka dan Sulawesi Selatan Merdeka. Dalam situasi itu pada tanggal 15 November 1999, ia terpanggil kembali oleh semangatnya, melakukan rapat luar biasa DPD, DPC PEPABRI se Sulawesi Selatan hasilnya berupa pernyataan:

“Tetap mendukung NKRI dan merah putih sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia. Mengutuk oknum yang menurunkan Sang Merah Putih sebagai menghina seluruh bangsa Indonesia” dan “Soal Sulawesi Selatan Merdeka” adalah urusan HAM yang harus diperjuangkan secara konstitusional, demokratis tanpa tekanan dan bebas money politik (Mattalatta, 2014: 618).

Apabila kita mengkaji Pemberontakan DII/TII atau NIT, kita dibawa untuk menarik jarak dari peristiwanya sehingga berpeluang untuk mengkritisi NKRI dengan kelemahan dan kelebihanannya, tetapi jika kita membaca buku ini terkesan bahwa kita disadarkan tentang perjuangan yang tanpa pamrih. NKRI adalah milik kita bersama. Ia tulus meskipun turun pangkatnya, ia juga tulus pada bekas murid dan bawahannya memiliki pangkat yang lebih tinggi. Namun ia sangat tersinggung dan marah ketika dianggap tidak nasionalis dan menyaksikan bangsanya dijajah bangsa lain. Hal ini berbeda dengan Kahar Muzakar dan para pengikutnya yang tersinggung karena tidak diterima menjadi TNI.

PENUTUP

Sebagai suatu bacaan seluruh literature itu sah-sah saja. Semuanya saling melengkapi. Semua berperan sesuai kemampuan dan profesi masing-masing secara maksimal untuk menciptakan kajian yang

obyektif. Dapat dimengerti jika keseluruhan deskripsi berakhir dengan fakta terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Namun secara berurutan karya sarita Pawiloy dan Massiara sangat mudah dipahami, karena sifatnya yang deskriptif naratif dikisahkan secara runtut dari perpektif waktu, di dalamnya tidak terdapat analisa, kecuali hanya mengemukakan hubungan kausalitas antar para pelaku sejarah. Karya Leirissa semestinya dibaca dengan bersyarat, yakni telah membaca karya Massiara atau Sarita Pawiloy, sehingga dapat memahami konteks yang menyeluruh pada masa itu. Sementara itu Chaniago memberi gambaran menyeluruh baik perkembangan diplomasi maupun bersenjata, bahkan perkembangan semangat jaman, sejak awal abad 20 sampai bubarnya NIT.

Dari uraian diatas jika kita hendak menanamkan sikap intelektualitas sebagai diplomat maka karya Leirissa, Anak Agung Gde Agung tepat untuk dijadikan pilihan, tetapi jika hendak mengarahkan Nasionalisme siswa maka karya-karya Masiaara, Sarita Pawiloy dan terutama Chaniago patut dijadikan pilihannya. Sementara itu untuk membuka semangat kebangsaan yang ditandai rasa memiliki dan tanggung jawab atas bangsa Indonesia secara keseluruhan karya Andi Mattalatta tepat untuk dijadikan bacaan utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mattalatta. 2014. *Meniti Siri dan Harga Diri, Catatan dan Kenangan*. Jakarta; Khasanah manusia Nusantara.
- Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti, 1989.
- Chaniago, J.R. 2002. *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia : Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatra Timur 1950*. Yogyakarta: Univer-

- sitas Gadjah Mada,.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Unity Press.
- Sarita Pawiloy, dkk. 1987. *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan (17 Agustus 1945-17 Agustus 1950)* (Ujungpandang: Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Selatan.
- Massiara Daeng Rappi, H.A.. 1988. *Menyingkap Tabir Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Bhineka Tunggal Ika.
- R.Z. Leirissa. 2006. *Kekuatan Ketiga, Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta:PT Sidar Inta Firsatama.
- Salim Said, 2015. "Peran Mayor Jenderal TNI (Purn) Andi Mattalata dalam Merebut Kemerdekaan dan Memperjuangkan NKRI" Makalah tidak terbit.